

## IMPLIKASI STANDAR MONETER INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN SHORT TERM MONETER SYARIAH

**M. Muzirul Alam, Putri Amalia Zahra, Citra Nur Islamiyah, Auliyah Diana Diva**

Universitas Trunojoyo Madura

Email: [220721100069@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100069@student.trunojoyo.ac.id),  
[220721100168@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100168@student.trunojoyo.ac.id), [220721100007@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100007@student.trunojoyo.ac.id),  
[220721100064@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100064@student.trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah dengan memperhatikan kesesuaian antara kedua kerangka kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur dan sumber data sekunder. Analisis data menunjukkan bahwa integrasi antara standar moneter internasional dan prinsip syariah dalam konteks short-term moneter memiliki implikasi yang kompleks. Terdapat tantangan terkait ketersediaan instrumen keuangan syariah, pengaturan regulasi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan kemampuan bersaing global lembaga keuangan syariah. Implikasi standar moneter internasional dalam short-term moneter syariah memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek keuangan, regulasi, dan prinsip syariah. Diperlukan investasi dalam pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif, penyesuaian regulasi yang mendukung prinsip-prinsip syariah, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga keuangan syariah dan internasional.

**Kata Kunci:** Standar Moneter Internasional, Short-Term Moneter Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah.

### PENDAHULUAN

Transformasi signifikan dalam sistem keuangan global selama beberapa dekade terakhir, terutama dengan berkembangnya sektor keuangan syariah, menunjukkan perubahan yang fundamental dalam cara individu dan lembaga mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan ini semakin penting karena semakin banyaknya individu dan entitas yang membutuhkan akses ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang memberikan pedoman lengkap untuk kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan aturan yang harus diikuti oleh para pengikutnya dalam segala aspek kehidupan. Namun, meskipun Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, sayangnya, hingga saat ini, umat Islam di seluruh dunia masih menghadapi kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasikan hukum dan peraturan tersebut, terutama dalam konteks perbankan dan keuangan.

Menurut (Andri Soemitra), ada tiga konsep utama yang terkait dengan pemahaman landasan filosofis keuangan Islam. Pertama, adalah hukum Islam (syariah) yang menjadi dasar pemikiran perbankan Islam. Syariah mencakup prinsip-prinsip yang mengatur transaksi keuangan, mengarahkan para pengikutnya untuk mematuhi aturan-

---

<sup>1</sup> Lis Yulitasari, "Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2024): 14.

aturan yang sesuai dengan ajaran agama. Kedua, adalah teori moneter dan makro, yang membantu menjelaskan mengapa Islam menolak transaksi melalui tingkat bunga dan dampak ekonomi yang luas dari larangan tersebut. Dalam Islam, riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan merugikan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap orang miskin. Ketiga, adalah teori perbankan itu sendiri yang membantu menjelaskan sifat perbankan dan keuangan Islam serta mengevaluasi kinerja komparatifnya<sup>2</sup>.

Perkembangan Perbankan Syariah dapat diuraikan menjadi tiga tahapan utama, masing-masing dengan penekanan berbeda untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tahap pertama ditandai dengan upaya memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Pada tahap ini, inisiatif yang diambil termasuk promosi pemahaman yang lebih baik terhadap norma-norma Islam oleh pelaku pasar, peningkatan landasan regulasi kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, upaya juga difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional serta melengkapi sistem dengan analisis yang mendukung stabilitas sistem secara keseluruhan. Tahap kedua menitikberatkan pada penguatan struktur industri Perbankan Syariah. Inisiatif dalam tahap ini mencakup penerapan kerangka pengawasan terintegrasi yang lebih efektif, yang menggabungkan aspek keuangan dan aspek syariah. Selain itu, dilakukan penerapan sistem regulasi berbasis risiko pada Perbankan Syariah Indonesia, dukungan terhadap aliansi strategis dan kerja sama dengan lembaga pendukung terkait, serta penyusunan skema jaring pengaman yang tepat guna untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tahap ketiga fokus pada upaya pemenuhan standar internasional dalam produk dan layanan keuangan. Pada tahap ini, Perbankan Syariah berupaya untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan memenuhi standar internasional. Hal ini melibatkan penyesuaian dan peningkatan dalam proses bisnis, produk, dan layanan agar sesuai dengan tuntutan standar internasional dalam industri keuangan.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, peran standar moneter internasional menjadi subjek yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Ini karena standar-standar ini tidak hanya mengatur kebijakan moneter di tingkat nasional, tetapi juga membentuk kerangka kerja yang mempengaruhi perkembangan short-term moneter syariah secara global. Pertimbangan ini sangat penting mengingat short-term moneter syariah memiliki peran yang krusial dalam menjaga likuiditas pasar dan mendukung aktivitas keuangan sehari-hari dalam ekosistem keuangan syariah.

Standar moneter internasional, yang diterapkan oleh organisasi seperti IMF dan Bank Dunia, memberikan kerangka kerja yang mengatur kebijakan moneter, sistem perbankan, dan instrumen keuangan lainnya di seluruh dunia. Ini mencakup pengawasan likuiditas, penetapan suku bunga, dan regulasi perbankan yang berlaku untuk semua jenis lembaga keuangan, termasuk yang beroperasi dalam konteks syariah.

Standar moneter internasional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem moneter syariah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan sistem moneter syariah terhadap sistem moneter internasional. Dalam penelitian ini, akan dianalisis implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short term

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Prenada Media, 2014).

<sup>3</sup> Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–98, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>.

moneter syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi praktisi, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan sistem keuangan syariah secara global.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Standar Moneter Internasional

Standar Moneter Internasional (IMF) adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem moneter internasional dan membantu negara-negara untuk mengontrol inflasi dan stabilitas ekonomi. Standar Moneter Internasional merujuk pada seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengatur kebijakan moneter mereka. Standar ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam sistem keuangan global, seperti stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan perlindungan terhadap krisis keuangan<sup>4</sup>.

Standar Moneter Internasional bertujuan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi global dengan mengatur kebijakan moneter, mengendalikan pergerakan mata uang, dan memberikan kerangka kerja bagi kerjasama internasional dalam masalah-masalah keuangan. Ini membantu mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dan mengurangi dampak krisis keuangan yang meluas<sup>5</sup>. Dua organisasi utama yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan Standar Moneter Internasional adalah Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. IMF memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan moneter negara-negara anggotanya, memberikan pinjaman dalam situasi krisis, dan memberikan saran keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Sementara itu, Bank Dunia fokus pada pengembangan ekonomi dan memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang<sup>6</sup>.

### 2. Short Term Moneter Internasional

Short-term Moneter Internasional merujuk pada aktivitas keuangan yang berkaitan dengan pergerakan dana dan investasi jangka pendek antara negara-negara di pasar keuangan global. Ini melibatkan instrumen keuangan seperti surat berharga, deposito, valuta asing, dan investasi jangka pendek lainnya yang memiliki siklus hidup relatif singkat, biasanya kurang dari satu tahun<sup>7</sup>.

Short-term Moneter Internasional membantu memfasilitasi aliran modal dan likuiditas antara negara-negara untuk tujuan-tujuan seperti pembiayaan perdagangan internasional, spekulasi valuta asing, investasi jangka pendek, dan pengelolaan risiko keuangan. Hal ini memungkinkan perusahaan, bank, dan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan modal dalam jangka waktu yang relatif singkat. Instrumen keuangan yang digunakan dalam Short-term Moneter Internasional

---

<sup>4</sup> Muhammad Lutfi and Hendra Ibrahim, "International Monetary Fund (IMF) Dan Penanggulangan Krisis Moneter Di Indonesia," *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 2, no. 2 (2024): 26–38.

<sup>5</sup> Muhammad Luis, "Peran Pinjaman International Monetary Funding (IMF) Untuk Perekonomian Indonesia Pada Sistem Standar Moneter," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 02 (2023): 125–32.

<sup>6</sup> Lutfi and Ibrahim, "International Monetary Fund (IMF) Dan Penanggulangan Krisis Moneter Di Indonesia."

<sup>7</sup> Samr Hakim, "INSTRUMEN PASAR UANG ISLAM," *Handbook Perbankan Islam*, 2018, 243.

meliputi surat berharga seperti Treasury Bills, Commercial Paper, Certificate of Deposit (CD), dan juga transaksi valuta asing (forex) serta investasi jangka pendek lainnya. Instrumen-instrumen ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan investasi pada tingkat global<sup>8</sup>.

### 3. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip Ekonomi Syariah merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang digunakan dalam ekonomi Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan mematuhi prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip ini berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Hadis yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, keuangan, perdagangan, dan bisnis. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yang didefinisikan sebagai keuntungan atau bunga yang dihasilkan dari pinjaman uang. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang melibatkan riba, seperti bunga bank konvensional, tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Sebagai gantinya, ekonomi syariah mendorong penggunaan mekanisme keuangan yang berbasis pada bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah<sup>9</sup>.

Prinsip ekonomi syariah juga menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Sistem ini mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi dan memperoleh pendapatan yang layak. Hal ini tercermin dalam konsep zakat, infak, dan sedekah yang mengatur kewajiban memberikan kontribusi bagi kepentingan sosial dan pemerataan ekonomi. Selain riba, ekonomi syariah juga melarang transaksi yang dianggap haram atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti perjudian, minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Prinsip ini mengarah pada promosi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam<sup>10</sup>.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi mengenai implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah adalah metode kualitatif dengan fokus pada analisis literatur dan penggunaan sumber data sekunder. Metode ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu yang kompleks seperti integrasi antara standar moneter internasional dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks short-term moneter. Sumber data sekunder seperti laporan resmi dari lembaga keuangan internasional (seperti IMF, Bank Dunia), lembaga keuangan syariah, publikasi akademis, dan laporan riset terbaru akan digunakan untuk mendukung temuan dan analisis dalam penelitian. Setelah data dari literatur dan sumber data sekunder dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menerapkan teknik analisis data yang tepat. penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah.

---

<sup>8</sup> Yati Kurniati, "Kemungkinan Penerapan Kebijakan Arus Modal Jangka Pendek Dan Dampaknya Bagi Stabilitas Nilai Tukar," *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 3, no. 3 (2000): 142–202.

<sup>9</sup> Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2013): 19–34.

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### *Implikasi Standar Moneter Internasional dalam Perkembangan Short Term Moneter Syariah*

Implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah merupakan topik yang menarik dan kompleks. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari ketersediaan instrumen keuangan syariah hingga pengaturan regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks standar moneter global.

*Pertama*, Salah satu implikasi utama dari standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah adalah ketersediaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini, yang mencakup murabahah, mudharabah, dan ijara, merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang berfokus pada prinsip-prinsip Islam<sup>11</sup>. Namun, tantangan muncul ketika instrumen-instrumen ini tidak selalu sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam prakteknya, banyak lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan dalam mengembangkan instrumen-instrumen short-term yang memenuhi persyaratan syariah sambil tetap mematuhi standar moneter internasional<sup>12</sup>. Misalnya, ada regulasi yang mendorong tingkat likuiditas tinggi atau mungkin menuntut investasi dalam instrumen keuangan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan regulasi keuangan internasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks short-term moneter syariah. Oleh karena itu, tantangan ini menyoroti perlunya harmonisasi antara standar moneter internasional dan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan ketersediaan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam jangka pendek.

Kedua, implikasi lainnya adalah terkait dengan regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah dalam konteks standar moneter internasional. Standar moneter internasional sering kali didesain dengan asumsi bahwa lembaga keuangan mengikuti model perbankan konvensional, yang mungkin memiliki perbedaan fundamental dalam hal struktur, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. Penerapan standar moneter internasional dalam konteks keuangan syariah memerlukan adaptasi dan penyesuaian yang cermat. Hal ini menuntut pengembangan regulasi yang mendukung prinsip-prinsip syariah tanpa mengorbankan stabilitas dan kepatuhan terhadap standar moneter global<sup>13</sup>. Artinya, peraturan dan pengawasan harus dirancang untuk memahami dan memperhitungkan karakteristik unik dari lembaga keuangan syariah, termasuk aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap hukum Islam, struktur keuangan yang berbeda, dan prinsip bagi hasil dalam operasional mereka.

Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar moneter internasional, regulator perlu mengadopsi pendekatan yang inklusif dan progresif dalam merancang regulasi dan kerangka pengawasan. Ini mencakup memperkuat kapasitas regulator, meningkatkan

---

<sup>11</sup> Melani Azzahra Nur and Maryam Batubara, "Model Analisis IS-LM Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 123–32.

<sup>12</sup> Ahmad Rodoni, Ainun Zamilah, and Bahrul Yaman, *Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah* (Penerbit A-Empat, 2021).

<sup>13</sup> Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65.

pemahaman tentang keuangan syariah, dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengawasan untuk memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan<sup>14</sup>. Dengan demikian, regulasi dan pengawasan yang sesuai akan membantu memperkuat fondasi keuangan syariah dan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam kerangka standar moneter internasional.

*Ketiga*, kemampuan bersaing global. Salah satu pertimbangan penting terkait dengan standar moneter internasional adalah kemampuan lembaga keuangan syariah untuk bersaing secara global. Standar tersebut seringkali mencakup persyaratan modal, likuiditas, dan manajemen risiko yang berpengaruh langsung pada daya saing lembaga keuangan syariah di pasar global<sup>15</sup>. Untuk mengatasi implikasi ini, lembaga-lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk memenuhi standar internasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasional mereka. Ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah harus mampu menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar internasional sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penerapan praktik terbaik dalam manajemen risiko, dan investasi dalam sistem dan infrastruktur yang memungkinkan mereka memenuhi standar internasional dengan efisien<sup>16</sup>.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan kerjasama regional dan internasional untuk mengatasi tantangan bersaing di pasar global. Ini mencakup berpartisipasi dalam forum-forum internasional, memperkuat hubungan dengan lembaga keuangan konvensional, dan mengembangkan jejaring dengan lembaga-lembaga keuangan syariah di negara lain<sup>17</sup>. Dengan demikian, untuk dapat bersaing secara global dalam konteks standar moneter internasional, lembaga keuangan syariah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat operasional mereka, meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, dan memperkuat kolaborasi lintas batas. Ini akan membantu mereka mempertahankan dan meningkatkan posisi mereka di pasar global sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah yang menjadi ciri khas dan keunggulan kompetitif mereka.

*Keempat*, dalam konteks integrasi dengan standar moneter internasional, lembaga keuangan syariah menghadapi serangkaian kesempatan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Kesempatan yang tersedia meliputi akses yang lebih luas ke pasar global, diversifikasi portofolio, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Dengan terbukanya akses ke pasar global, lembaga keuangan syariah memiliki peluang untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan mendiversifikasi operasi mereka di berbagai negara. Selain itu, diversifikasi portofolio memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan mereka<sup>18</sup>.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam menghadapi standar moneter internasional. Salah satunya adalah pemenuhan standar yang kompleks

---

<sup>14</sup> Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.

<sup>15</sup> Adel Ahmed, "Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 4 (2010): 306–20.

<sup>16</sup> Anis Fuad Salam et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

<sup>17</sup> Abdul Rachman Abdul et al., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65.

<sup>18</sup> H M Anwar et al., *Manajemen Perbankan Syariah* (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

yang diperlukan oleh lembaga keuangan syariah untuk bersaing di pasar global. Kebutuhan akan kepatuhan terhadap standar internasional yang kompleks dapat memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, harmonisasi antara prinsip syariah dan standar internasional juga merupakan tantangan yang signifikan. Memastikan bahwa operasi keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sambil memenuhi persyaratan standar internasional dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua kerangka kerja tersebut<sup>19</sup>. Terakhir, pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang kuat juga menjadi tantangan, karena infrastruktur yang tepat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan syariah<sup>20</sup>. Dengan memahami kesempatan dan tantangan ini, lembaga keuangan syariah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang yang tersedia sambil mengatasi tantangan yang ada. Ini melibatkan komitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, investasi dalam infrastruktur yang diperlukan, dan kerjasama antar lembaga keuangan syariah serta lembaga-lembaga internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks keuangan global yang semakin terintegrasi.

### ***Kesesuaian Standar Moneter Internasional dan short-term moneter internasional Dengan Prinsip Syariah***

Kesesuaian standar moneter internasional dan short-term moneter internasional dengan prinsip syariah menjadi perhatian utama dalam mengembangkan sistem keuangan global yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Standar moneter internasional, yang ditetapkan oleh organisasi seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, memengaruhi kebijakan moneter, sistem perbankan, dan instrumen keuangan lainnya di seluruh dunia. Di sisi lain, short-term moneter internasional mempengaruhi pengelolaan likuiditas dan pembiayaan jangka pendek, yang merupakan aspek penting dalam operasi lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah.

Seperti yang sudah diketahui, bahwa prinsip syariah, yang menjadi dasar bagi keuangan syariah, mengatur transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram. Oleh karena itu, kesesuaian antara standar moneter internasional dan short-term moneter internasional dengan prinsip syariah memiliki implikasi yang signifikan dalam pengelolaan sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks standar moneter internasional, perhatian utama tertuju pada kebijakan moneter dan regulasi perbankan yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Tantangan yang muncul terkait kesesuaian antara standar moneter internasional dan prinsip syariah meliputi beberapa aspek yang signifikan. Pertama adalah larangan riba, di mana prinsip syariah secara tegas melarang bunga. Hal ini dapat menghasilkan konflik dengan kebijakan moneter yang sering kali menggunakan bunga sebagai instrumen utama<sup>21</sup>. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada tugas rumit untuk menemukan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan likuiditas dan kebijakan moneter mereka.

<sup>19</sup> Salam et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan*.

<sup>20</sup> Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan," *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 8, no. 1 (2018): 16–23.

<sup>21</sup> Yenny Kornitasari et al., *Pengantar Ekonomi Moneter Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2023).

Selain itu, regulasi dan pengawasan lembaga keuangan syariah harus disesuaikan agar tetap mematuhi standar internasional tanpa melanggar prinsip syariah. Proses ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia serta kerja sama yang erat antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan lembaga internasional<sup>22</sup>. Adapun pengembangan produk dan layanan juga menjadi tantangan penting, karena lembaga keuangan syariah harus terus mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah sambil memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar global. Inovasi dalam instrumen keuangan syariah short-term menjadi krusial dalam mengatasi tantangan likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah yang mengutamakan adil dan transparan. Dengan demikian, kesesuaian standar moneter internasional dengan prinsip syariah memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek keuangan, regulasi, dan penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan global.

Dalam konteks short-term moneter internasional, kesesuaian dengan prinsip syariah menghadapi tantangan yang berdampak pada beberapa aspek penting. Pertama, tantangan terkait ketersediaan instrumen keuangan syariah menjadi fokus utama. Lembaga keuangan syariah membutuhkan akses yang memadai ke instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengelola likuiditas dan pembiayaan jangka pendek mereka. Namun, tantangan muncul ketika instrumen-instrumen tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, sehingga memerlukan inovasi dan pengembangan lebih lanjut<sup>23</sup>.

Selanjutnya, likuiditas dan investasi menjadi perhatian penting dalam konteks prinsip syariah. Prinsip syariah mengatur pengelolaan likuiditas dan investasi dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti murabahah, mudharabah, dan ijara<sup>24</sup>. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa kebijakan dan praktik mereka dalam mengelola likuiditas dan investasi jangka pendek mematuhi prinsip syariah, sambil tetap memenuhi kebutuhan likuiditas yang diperlukan untuk operasi sehari-hari.

Terakhir, tantangan terkait manajemen risiko juga menjadi perhatian dalam operasi keuangan syariah. Prinsip syariah juga mengatur manajemen risiko, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan investasi dan pengendalian risiko yang sesuai dengan standar internasional. Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa manajemen risiko mereka mencakup aspek-aspek tersebut secara holistik untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah sambil meminimalkan risiko operasional dan keuangan<sup>25</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan, implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah membawa sejumlah tantangan dan kesempatan yang perlu diatasi dan dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah. Ketersediaan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi kunci, tetapi harus

---

<sup>22</sup> Wafiq Azizah and Muhammad Farid, "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2021): 67–80.

<sup>23</sup> Rifqi Muhammad and Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Resiko Pembiayaan Dan Resolusi Syariah Pada Peer-to-Peer Financing," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 63.

<sup>24</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>25</sup> Ayub.



diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar moneter global. Regulasi dan pengawasan yang memadai perlu dikembangkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan. Kemampuan bersaing global memerlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama lintas batas. Meskipun terdapat tantangan kompleks seperti pemenuhan standar yang kompleks dan harmonisasi antara prinsip syariah dan standar internasional, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memanfaatkan kesempatan dan mengatasi tantangan tersebut.

Kesesuaian standar moneter internasional dan short-term moneter syariah adalah tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Implikasinya termasuk ketersediaan instrumen keuangan syariah, regulasi yang mendukung prinsip syariah, dan daya saing global lembaga keuangan syariah. Investasi dalam produk syariah inovatif, regulasi yang mendukung prinsip syariah, dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk mencapai kesesuaian optimal. Ini tidak hanya tentang memenuhi standar moneter internasional, tetapi juga menjaga integritas prinsip syariah dalam sistem keuangan global yang inklusif dan adil.

### Saran

Penelitian mengenai menganalisis implikasi standar moneter internasional dalam perkembangan short-term moneter syariah dengan memperhatikan kesesuaian antara kedua kerangka kerja tersebut. Dengan melakukan penelitian di diharapkan dapat ditemukana solusi yang praktis dan inovasi yang membantu lembaga keuangan syariah berkembang dan beradaptasi dengan kerangka standar moneter internasional sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65.
- Ahmed, Adel. "Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 4 (2010): 306–20.
- Ali, Misbahul. "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 1 (2013): 19–34.
- Anwar, H M, S H Erniyati, Abd Mubaraq, Sy SE, H Zaenal Aripin, S E Nuruddin Subhan, Usep Deden Suherman, S E Achmad, Novi Puspitasari, and Fatkhur Rohman Albanjari. *Manajemen Perbankan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Apriyanti, Hani Werdi. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan." *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 8, no. 1 (2018): 16–23.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Azizah, Wafiq, and Muhammad Farid. "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2021): 67–80.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.

- Hakim, Samr. "INSTRUMEN PASAR UANG ISLAM." *Handbook Perbankan Islam*, 2018, 243.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Kornitasari, Yenny, Rihana Sofie Nabella, Munawar Ismail, and Asfi Manzilati. *Pengantar Ekonomi Moneter Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2023.
- Kurniati, Yati. "Kemungkinan Penerapan Kebijakan Arus Modal Jangka Pendek Dan Dampaknya Bagi Stabilitas Nilai Tukar." *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 3, no. 3 (2000): 142–202.
- Luis, Muhammad. "Peran Pinjaman International Monetary Funding (IMF) Untuk Perekonomian Indonesia Pada Sistem Standar Moneter." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 02 (2023): 125–32.
- Lutfi, Muhammad, and Hendra Ibrahim. "International Monetary Fund (IMF) Dan Penanggulangan Krisis Moneter Di Indonesia." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI* 2, no. 2 (2024): 26–38.
- Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa. "Analisis Resiko Pembiayaan Dan Resolusi Syariah Pada Peer-to-Peer Financing." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 63.
- Nur, Melani Azzahra, and Maryam Batubara. "Model Analisis IS-LM Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 7, no. 1 (2023): 123–32.
- Rodoni, Ahmad, Ainun Zamilah, and Bahrul Yaman. *Implementasi Dan Kinerja Reksa Dana Syariah*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Salam, Anis Fuad, M M SE, M E Septantri Shinta Wulandari, S E Ahmad Solihin, and S M Palahiyah. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Shandy Utama, Andrew. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–98.
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Prenada Media, 2014.
- Yulitasari, Lis. "Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia." *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2024): 14.